

PARSITIPASI MASYARAKAT DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DISTRIK WAENGI KABUPATEN PUNCAK JAYA

LEIRON WONDA
MASJE SILIJA PANGKEY
WELSON ROMPAS

Abstrak : Dalam pengurusan dan kepemilikan KK dan KTP warga masyarakat di Distrik Waengi Kabupaten Puncak Jaya Masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui parsitipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan di distrik waengi kabupaten puncak jaya.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata, data dan perilaku yang diamati. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif terhadap satu variable yaitu parsitipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan di Distrik Waengi Kabupaten Puncak Jaya. Dalam penelitian ini pihak yang akan dijadikan informan adalah informan yang dipilih untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat sesuai dengan objek yang akan diteliti. Prosedur pengambilan informan awal selanjutnya dengan teknik snowbaal, yaitu mengambil satu orang kemudian diwawancarai yang selanjutnya bergulir kepada informan yang lain secara berantai sesuai dengan informan yang telah ditetapkan adalah perwakilan dinas kependudukan, pemerintah Distrik, Tokoh masyarakat dan masyarakat penduduk setempat.

Kesadaran masyarakat dan parsitipasi spontan dari masyarakat untuk kepemilikan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk 30 persen penduduk distrik waengi sudah memiliki, sedangkan 70 persen penduduk belum memiliki. kendala-kendala yang dialami penduduk adalah jalan darat, transportasi, pembiayaan angkutan, pekerjaan dan jarak tempuhnya tempat pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk rendah berjumlah 13 persen, penduduk dengan tingkat partisipasi sedang berjumlah 7 persen, sedangkan tidak terdapat penduduk dengan tingkat partisipasi tinggi pada jarak kurang dari 300 kg. Penduduk dengan jarak tempat tinggal 309 m – 700 m dengan tingkat partisipasi rendah berjumlah 23 persen, penduduk dengan tingkat partisipasi sedang berjumlah 20 persen, dan penduduk dengan tingkat partisipasi tinggi 10 persen di distrik waengi kabupaten puncak jaya.

Kata kunci : Parsitipasi; Masyarakat; Administrasi; Kependudukan.

Abstract: In the management and ownership of KK and KTP, the community members in Waengi District, Puncak Jaya Regency are still low. The purpose of this study was to determine community participation in population administration in Waengi District, Puncak Jaya Regency.

This study uses qualitative research to produce descriptive data in the form of words, data and observed behaviors. This study is a qualitative study of one variable, community participation in population administration in Waengi District, Puncak Jaya Regency. In this research the parties that will be used as informants are the informants who are chosen to obtain clear and accurate information in accordance with the object to be examined. The procedure for taking the initial informants is then using the snowbaal technique, which is taking one person then being interviewed and then rolling to the other informants in sequence in accordance with the informants that have been determined are representatives of the population office, the District government, community leaders and local residents.

Community awareness and spontaneous participation from the community for the ownership of family cards and identity cards 30 percent of the Waengi district residents already have, while 70 percent of the population does not yet have. the constraints experienced by the population are road, transportation, transportation financing, employment and the distance to place a family card and a low population identity card at 13 percent, a population with a moderate participation rate of 7 percent, while there is no population with a high level of participation at distance is less than 300 kg. Residents with a distance of 309 m - 700 m with a low participation rate of 23 percent, a population with a moderate participation rate of 20 percent, and residents with a high participation rate of 10 percent in the Waengi district of Puncak Jaya district.

Keywords: Participation; Public; Administration; Population

PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan secara nasional, Negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan Hukum atas setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada disetiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan perubahan Kartu Keluarga, kartu Data Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya.

Dalam pelaksanaan administrasi kependudukan di Distrik Waengi Kabupaten Puncak Jaya masih terkendala pada partisipasi masyarakat demi terselenggaranya administrasi kependudukan yang aman, tertib dan jujur di Distrik Waengi Kabupaten Puncak Jaya belum ada E-KTP masih manual, setelah melakukan observasi awal terkait pelaksanaan administrasi kependudukan di Distrik Waengi Kabupaten Puncak Jaya, diketahui bahwa rendahnya partisipasi masyarakat pengurusan Kartu tanda penduduk dan Kartu keluarga disebabkan karena spontan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen data kependudukan sebagai identitas dan nasal usul setiap penduduk masih rendah. Mengingat dokumen kependudukan, menjadi sangat penting akan tetapi bila tingkat kepemilikan data kependudukan di Indonesia masih terbilang rendah lebih khususnya di Distrik Waengi Kabupaten Puncak Jaya.

Distrik waengi memiliki 12 Desa, didalam Desa juga memiliki jumlah penduduk yang berbeda. Di distrik Waengi tidak semua masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk turut berpartisipasi dalam

administrasi kependudukan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data demografi dari jumlah total jumlah penduduk di distrik waengi 15.310 dari jumlah penduduk yang wajib ber-KTP, namun ada 70% yang belum memiliki KTP.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, dalam pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Senada menurut pendapat Mubyarto (1997:35) bahwa mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Hambatan dalam Partisipasi Masyarakat

Hambatan atau kendala dalam partisipasi tergantung pada situasi setempat, adalah:

- a) Waktu, masyarakat akan meluangkan waktunya untuk proyek apabila mereka merasa bahwa proyek berguna.
- b) Menyusun dan membuat pandangan mereka sendiri, partisipasi akan menjadi kendala apabila dalam forum-forum masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk menyalurkan pandangan mereka.

Sikap profesional, sikap dari para pelaksana (pendamping dan aparat pemerintah) harus berpihak kepada masyarakat. Mereka harus percaya kepada kemampuan masyarakat dan dapat membagi pengetahuannya

Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Conyers (1991) memberikan tiga alasan utama sangat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu :

- a) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi

nengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadiran program pembangunan.

- b) masyarakat mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk-beluk kebutuhan masyarakat dan merasa memiliki hal dibutuhkan tersebut,

Tingkat Kesukarelaan Parsitipasi Masyarakat Dusseldorp dalam Turindra (2010:25), membedakan adanya beberapa tingkat kesukarelaan dalam parsitipasi masyarakat. Adapun tingkat kesukarelaan parsitipasi spontan dan parsitipasi kebiasaan tersebut sebagai berikut :

- a) Tingkat Kesadaran Masyarakat
- b) Tingkat Parsitipasi Masyarakat

Pengertian Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain (Depdagri RI Dirjen Administrasi Kependudukan 2008).

Parsitipasi Masyarakat Dalam Administrasi Kependudukan

Parsitipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan merupakan salah satu bukti keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan, administrasi kependudukan merupakan kegiatan pendaftaran dan pencatatan penduduk secara rutin yang dilakukan oleh instansi pelaksana sesuai dengan kejadian vital kependudukan seperti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan beberapa konsep atau pengertian

yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- a) Nomor Induk Kependudukan NIK
- b) Kartu Keluarga KK
- c) Kartu Tanda Penduduk KTP

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data, meneliti, dan menganalisis data. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana digunakan karena ada beberapa pertimbangan.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun yang menjadi fokus penelitian adalah parsitipasi Masyarakat dalam Administrasi kependudukan di Distrik Waengi Kabupaten Puncak Jaya. Adapun indikator dalam penelitian yaitu :

- 1) Tingkat Kesadaran Masyarakat
- 2) Tingkat Parsitipasi Spontan

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Distrik Waengi Kabupaten Puncak Jaya.

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini pihak yang akan dijadikan informan adalah informan yang dipilih untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat sesuai dengan objek yang akan diteliti. Prosedur pengambilan informan awal selanjutnya dengan teknik *snowbaal*, yaitu mengambil satu orang kemudian diwawancarai yang selanjutnya bergulir kepada informan yang lain secara berantai sesuai dengan informan yang telah ditetapkan.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1. Data Primer

Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk

mencara data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara :

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Studi Dokumentasi

2. Data Sekuder

Dalam penelitian ini data-data sekuder yang diperlukan antara lain buku-buku, artikel, majalah, peraturan-peraturan dan lain-lain yang memiliki relenvansi dengan masalah yang akan diteliti.

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu menguraikan data serta mengimpretasikan data yang diperoleh dilapangan dari pada informan, hasil pengamatan, serta data dokumen lainnya.

- a. Reduksi data
- b. Penyajian data
- c. Menarik kesimpulan/verifikasi, menarik kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

- a. Tingkat Kesadaran Masyarakat Untuk Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kondisi lingkungan yang dialami masyarakat yang ada di distrik waengi saat ini sulit akses jalan dan transortasi karena daerah tersebut dibalik pengunungan, kemudian disebelah sungai yamo yang terkenal di pengunungan tenga papua. Sebab itu masyarakat ingin berparsitipasi untuk mengurus kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. kartu keluarga dan kartu tanda penduduk sangat penting dalam kehidupan kita ,namun adanya kendala yang dialami oleh masyarakat adalah jalan, Tansportasi, dan pebiayaan maka masyarakat belum untuk memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, menganggap sepele kepemilikan KK dan KTP.

Adapun kendala-kendala yang di alami masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Jalan
 2. Transportasi
 - c. Pebiayaan
- b. Tingkat Parsitipasi Spontan Dari Masyarakat Untuk Pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Berdasarkan data hasil wawancara dengan Bidang pendaftaran penduduk, sebanyak 30 persen tingkat partisipasi spontan dari masyarakat distrik waengi dalam pengurusan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk rendah, sedangkan 70 persen tingkat partisipasi spontan dari masyarakat termasuk kedalam kategori sedang dan rendah. Menurut menurut dinas pendaftaran penduduk, hanya terdapat beberapa orang yang berpartisipasi langsung. Masyarakat yang berpartisipasi langsung terlihat ketika terdapat memahami penting kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.

1. Jenis pekerjaan
2. Jarak tempat tinggal dengan tempat pembuatan KK dan KTP

PENUTUP

Kesimpulan

Yang dapat penulis ambil sebagai kesimpulan adalah:

1. Kesadaran masyarakat untuk kepemilikan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) memang ada ingin memiliki kartu tanda penduduk ini, terlebihnya 30 persen sudah memiliki kesadaran memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk kemudian 70 persen belum memilikinya, karena kondisi saat ini masyarakat mengalami kesulitan akses jalan darat di kampung-kampung belum terjangkau hanya sampai distrik saja, kamudian transportasi jarang masuk di distrik waengi dan pembiayaan juga cukup besar yakni 500,000 (lima ratus ribu rupiah) biaya angkutan pulang pergi

menyebabkan masyarakat distrik waengi tidak berpartisipasi secara aktif.

2. Partisipasi Spontan dari masyarakat untuk mengurus kartu keluarga dan kartu tanda penduduk kendala-kendala yang dialami masyarakat adalah pekerjaan masyarakat sebagai petani berkebun maka masyarakat menganggap bahwa mengganggu aktivitas mereka, kemudian jarak tempuh yang sangat jauh dari tempat pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk <300 kg. demikian karena daerah tersebut dibalik pengunungan wura manggu sebelah sungai yamo, maka masyarakat distrik waengi belum berpartisipasi untuk mengurus Kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, penulis akan disarankan sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi masyarakat di distrik waengi kabupaten puncak jaya harus di perhatikan lagi. Upaya dari pemerintahan diharapkan dapat dilakukan secara terus menerus bukan sekedar memperbaiki saja agar setiap permasalahan yang di temukan dapat langsung di selesaikan dan di cari solusinya
2. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah pihak pemerintahan melakukan survei-survei kerumah warga yang dilakukan oleh pihak distrik atau pihak kampung, dengan cara seperti ini sebagian warga merasa bahwa tidak ada perbedaan antara warga satu dengan yang lainnya, dan dengan cara seperti ini diharapkan seluruh masyarakat distrik waengi mempunyai kesempatan untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda pendudu.
3. Solusi yang lain yaitu melakukan pembagian brosur yang berisikan pemberitahuan mengenai prosedur-prosedur pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang disampaikan

oleh pihak distrik atau pihak kampung setempat.

4. pemerintah distrik harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten puncak jaya dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di distrik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti S.I. A.D. 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Pelajar. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Adi Isbandia R. 2001. Pemberdayaa Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas Pengantar Pada Pemikiran Dan Pendekatan *Praktis*. Jakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Alfiandra. 2009. Kajian Partisipasi Masyarakat Yang Melakukan Pengelolaan Persampahan Di Kelurahan Ngaliyan Dan Kalipancur. Kota Semarang : Tesis PPS- UNDIP.
- Apriyani R. 2012. Partisipasi Masyarakat Dalam pelestarian Hutan Mangrove Di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Agustin M. 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang. Surabaya : Jurnal Iimiah S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya.
- Conyers D. 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Dedy S. 2001. Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan Bogor : Gramedia Pustaka utama.

- Depdagri RI Dirjen Administrasi Kependudukan 2008. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Dusseldorp D.B.W.N. 1981 Participation In Planned Development Influced By Goverments Of Developing Local In Rural Areas. Wageningen : Wageningen University.
- Isbandi R. A. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas Dari Perkiraan Menuju Penerapan. Depok : Fisip Universitas Indonesia
- Mardikanto S. 2012. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabeta.
- Mikkelsen B. 2003 Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaannya. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Miles Mathew B. M. Hu. dan Johny S. 1992. Qualitative Data Analysis-Third Edition. London : Sage Publication.
- Moleong, L. J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. 1985. Peluang Dan Berusaha Di Pedesaan. Yogyakarta : BPF.
- Ndraha T. 1990. Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta : Rineka Cipta.
- Rochman A. A. 2009. Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Di Kelurahan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Surabaya: Undergraduate Tesis UIN Sunan Ampel.
- Rubiyanto R. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Surakarta : Universitas Muhammadiyah.
- Siagian, P. S. 1997. Filsafat Administrasi Jakarta : PT. Rineka Cipta. .
- Soemartono T. Dan Sri H. 2011. Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi. Bandung : Yayasan Bina Profesi Mandiri.
- Soewarno H. 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Haji Masagung.
- Sumaryadi I. N. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Penerbit Citra Utama.
- Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Subrata K. 1991. Dinamika Kelompok Moral Kelompok Dan Kepemimpinan Kelompok. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Sunarti. 2003. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok. Jurnal Tata Loka. Semarang : Planologi UNDIP.
- Slamet Y. 1994. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Peraturan Perundang-Undangan :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Jurnal Skripsi
- Turindra Aziz, 2010. Tingkat Parsitipasi Masyarakat Desa Dalam Kegiatan Simpang Pinjam Khusus Di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

